**SISTEM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA DAN RELEVANSINYA DI TAPANULI BAHAGIAN UTARA**

**(*ANALISIS SOSIOLOGIS*)**

**Harisan Boni Firmando**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

boni.harisan@iakntarutung.ac.id

**ABSTRAK**

Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang atau pengikutnya, sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pemerintahan modern terhadap sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak Toba, dan untuk mengetahui pengaruh sistem kepemimpinan tradisional terhadap pemilihan pemimpin masyarakat kini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menekankan sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak Toba dan relevansinya kini. Sistem kepemimpinan tradisional dalam Batak Toba masih relevan hingga saat ini dari aspek teori dan prakteknya. Sistem kepemimpinan tradisional dapat dilihat dari aspek sosiologis dan historis, serta dikotomi yang pernah dirasakan oleh masyarakat Batak Toba karena pengaruh intervensi kolonial Belanda. Hal itu dikuatkan dengan realita pemilihan pemimpin di tengah masyarakat Batak Toba masa kini, dimana terjadi perubahan perilaku pemilih yaitu munculnya pemilih sosiologis yang semakin kuat.

***Kata Kunci: Sistem Kepemimpinan, Masyarakat Batak Toba***

**ABSTRACT**

Leadership is the ability to influence people or their followers, so that people behave as they want. The purpose of this study was to determine the influence of the modern government system on the traditional leadership system in the Toba Batak society, and to determine the effect of the traditional leadership system on the election of community leaders today. This research method uses qualitative research with data collection techniques, namely observation, interviews, and document study. The results of this study emphasize the traditional leadership system in Batak Toba society and its relevance today. The traditional leadership system in Batak Toba is still relevant today in terms of theory and practice. The traditional leadership system can be seen from the sociological and historical aspects, as well as the dichotomy experienced by the Toba Batak community due to the influence of Dutch colonial intervention. This is strengthened by the reality of the election of leaders in today's Toba Batak society, where there has been a change in voter behavior, namely the emergence of increasingly strong sociological voters.

***Keywords: Leadership System, Toba Batak Community***

**PENDAHULUAN**

Pemimpin merupakan pribadi yang disukai dan menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

Soekanto (2001:318) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Masyarakat batak ialah masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki. Simanjuntak (2017) mengatakan bahwa masyarakat yang bersifat genealogis patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Garis keturunan atau marga digunakan untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar sesama marga, dan dapat mempermudah mereka untuk mengetahui sistem kekerabatan diantara mereka.

Perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, namun kemampuan bekerja setiap manusia terbatas, baik secara fisik, daya pikir, waktu, tempat, pendidikan dan berbagai faktor lain. Keterbatasan ini menyebabkan manusia tidak dapat mencapai tujuannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain dan kerja sama yang baik akan mudah tercapainya dengan adanya seorang pemimpin. Hal tersebut merupakan dasar mengapa manusia selalu hidup dalam kelompok masyarakat.

Sumber daya yang ada dalam kelompok masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu kelompok masyarakat. Faktor lain yang sangat berperan penting adalah faktor kepemimpinan. Kepemimpinan berperan utama untuk menata anggota kelompok masyarakat dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perkembangan dari kelompok sosial menjadi suatu organisasi sosial bermula dari suatu kelompok kecil yang dapat mengadakan relasi sosial langsung, kemudian menjadi bertambah banyak anggotanya, sehingga menjadi semakin kompleks atau beragam sifatnya. Keadaan tersebut kemudian perlu diatur secara formal, dengan adanya pelapisan sosial dan kedudukan yang teratur. Dengan adanya keteraturan maka lama hidup atau umur organisasi menjadi lebih lama dibandingkan lamanya orang menjadi anggota suatu organisasi.

Pelapisan dalam masyarakat telah ada sejak masyarakat mengenal kehidupan bersama. Terjadinya stratifikasi sosial atau sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pelapisan yang terjadinya dengan sendirinya atau tidak disengaja dan sistem pelapisan yang terjadinya dengan sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepada masyarakat, berdasarkan kepemilian harta. Sistem lapisan masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan pembagian kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan.

Lapisan dalam masyarakat yang sederhana pada awalnya didasarkan pada sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya. Perbedaan kedudukan dan peran masih bersifat sementara, mengingat warganya masih sedikit dan anggota masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi tidak banyak jumlahnya. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula lapisan-lapisan dalam masyarakat.

Fokus utama dalam tulisan ini mendeskripsikan sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak Toba. Adanya indikasi kuat bahwa saat ini tidak semua daerah memiliki kepemimpinan yang kuat dalam masyarakat, bahkan banyak daerah yang mengalami krisis kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan menjadi salah satu persoalan yang dapat berdampak terhadap perpecahan dalam masyarakat. Kepemimpinan seringkali diidentikkan dengan suatu kekuasaan dan wewenang, sehingga dalam kepemimpinannya seringkali memaksakan kehendaknya dan setiap orang yang dipimpinnya seakan-akan dipaksa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Menyikapi kepemimpinan ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak Toba? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana pengaruh sistem pemerintahan modern terhadap sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak Toba? Apa pengaruh sistem kepemimpinan tradisional terhadap pemilihan pemimpin masyarakat kini?

**METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kriteria individu yang menjadi informan kunci adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan pengurus dalam perkumpulan sosial seperti perkumpulan marga, serikat tolong menolong dan gereja. Sedangkan informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu masyarakat, pengurus Gereja dan generasi muda yang langsung merasakan hidup sebagai anggota masyarakat Batak Toba. Pada studi ini ada 20 orang informan yang diwawancarai. Studi ini dilakukan di Empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Porsea di Kabupaten Toba, serta Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan Empat Kecamatan tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan kampung halaman masyarakat Batak Toba dan dalam kehidupan kesehariannya masyarakat yang bermukim di daerah tersebut merupakan anggota masyarakat Batak Toba, sehingga mengetahui bagaimana suku Batak Toba mengangkat, menghormati dan meneladani pemimpin.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Sistem Wilayah Pada Masyarakat Batak Toba Tradisional**

Kesatuan hidup manusia dalam suatu negara, desa, atau kota disebut masyarakat. Masyarakat sifatnya lebih luas, bersifat menetap dan terikat oleh kesatuan adat istiadat serta rasa identitas bersama, sedangkan komunitas bersifat khusus karena adanya ikatan lokasi dan kesadaran wilayah.Anggota suatu komunitas atau kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama, kelompok itu disebut masyarakat setempat. Ciri utama masyarakat setempat ini adalah adanya *social relationships* antara anggota kelompoknya (Soekanto, 2004: 149).

Desa terbentuk atas kesatuan manusia dalam masyarakat yang membentuk sistem kemasyarakatan, yang disesuaikan atas kondisi lingkungan di sekitarnya sebagai arena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Desa terbentuk berdasarkan dua aspek dasar yakni karakteristik masyarakat dan lingkungan kawasan perdesaannya. Desa mengandung sejumlah kearifan lokal, dimana nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut menjadi kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan, norma, tata krama/tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/jembatan, teknik perahu, dan sebagainya) (Jamaludin, 2015: 25).

Wilayah pada masyarakat batak tradisional terdiri atas beberapa tingkatan yaitu: *Huta*, *Lumban*/*Horja* dan *Bius*, tiap tingkatan dipimpin oleh seseorang yang disebut Raja dan mempunyai tugas tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Wilayah *huta* bagi orang Batak secara umum berarti kampung. J.C. Vergouwen mendefenisikan makna *huta* (kampung) bagi orang Batak Toba sebagai: “sebuah dunia kecil yang tertutup, satu kesatuan yang hidup dan terdiri dari sekelompok kecil orang yang terikat satu sama lain secara alami, dan sudah lama hidup di tempat ini, tempat anak-anak mereka lahir, tempat yang diharapkan menjadi kuburan mereka sendiri” (Vergouwen, 1985: 119).

*Huta* (kampung) merupakan tempat tinggal dari orang Batak yang berasal dari satu nenek moyang (satu *ompu*) dengan atau tanpa *boru*. Marga pendiri *huta* disebut marga raja (marga *tano*). Marga lain yang tinggal di *huta* dinamakan marga *boru*, mereka tidak mempunyai hak atas tanah. *Huta* didirikan oleh satu marga raja dan di dalam setiap *huta* Batak terdapat raja *huta* yaitu seorang dari pendiri *huta*. Raja *huta* didampingi oleh *pandua* (orang kedua, wakil) serta seorang dari *boru* yang ikut bersama dengan marga raja. Bila satu *huta* sudah dianggap padat, orang mengatasinya dengan mendirikan *huta* baru yang kemudian disebut *sosor*/*pagaran*. Alasan lain mendirikan *huta* karena ada pertentangan atau perkelahian di antara penghuni sebelumnya. Demikian dengan keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik atau karena ingin mandiri (*manjae*) dan memiliki kerajaan sendiri bebas dari kekuasan *huta* induk (Tampubolon, 1968: 7).

Desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan ini ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain (Bintarto, 1989: 11). Interaksi antar unsur tersebut dan dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain bagi masyarakat tradisional Batak Toba menimbulkan wilayah *horja*.

*Horja* adalah struktur dan organisasi wilayah yang terdiri dari beberapa wilayah *huta*, di mana pimpinan *horja* dinamakan raja *parjolo* (terdepan) yang didampingi oleh beberapa raja *partahi* (perencana). Dalam masyarakat Batak, pesta *horja* hanya dilaksanakan oleh mereka yang semarga. *Horja* sebagai sebuah federasi atau persekutuan bersama dibentuk oleh beberapa kampung (*huta*) dan sifat persekutuan itu adalah otonom. Fererasi *huta* yang disebut *horja* hampir selalu memiliki kampung induk. *Horja* merupakan unit yang masing-masing terikat satu dengan yang lain secara kesilsilahan, meskipun di antaranya terselip marga-marga lain yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga. *Horja* berhak mengikat janji dengan *horja* lain, misalnya untuk kepentingan bersama antara lain pertahanan. Awalnya, federasi *horja* adalah masyarakat kurban, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi masyarakat hukum, yang secara langsung mengurus kepentingan duniawi warganya (Siahaan, 2005: 154).

*Bius* adalah struktur wilayah dari sistem pemerintahan *Harajaon* Batak dengan wilayah tertentu dan mempunyai rakyat serta pemerintahan. *Bius* adalah tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dalam masyarakat Batak Toba dan pemerintahan *bius* sangat bersatu dengan agama dan adat. Wilayah *bius* terdiri dari beberapa *horja*. Kepala dan pimpinan *bius* disebut sebagai raja *doli*. *Bius* merupakan kesatuan pemujaan (*sombaon*)*,* banyaknya masalah yang tidak dapat ditangani oleh *horja* karena berada di luar kemampuannya (seperti musim kering yang berkepanjangan, penyakit kolera yang mewabah, masa panceklik dan panen yang gagal dan lain sebagainya), untuk memohon belas kasih serta perlindungan Tuhan maka penduduk membentuk kelompok yang beranggotakan semua marga yang tinggal diwilayah yang tertimpa bencana. Persekutuan inilah yang disebut sebagai *bius*. *Bius* merupakan gabungan beberapa *horja* yang terdapat dalam satu kesatuan teritorial yang memiliki identitas sosial tertentu. Marga-marga yang menjadi anggota suatu bius memiliki wilayah yang berbeda. Karena itu mereka merasa bahwa *sombaon* (Tuhan yang disembah) yang terdapat di wilayah mereka harus dipuja secara bersama-sama, supaya dapat memberi beri berkat dan ketenteraman di antara mereka (Simanjuntak 2006: 186).

1. **Pemimpin Dalam Masyarakat Batak Toba**

Perilaku seorang pemimpin dalam memimpin kelompok atau masyarakat disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan upaya pemimpin agar tujuan bersama dapat direalisasikan melalui orang lain dengan cara berkomunikasi, berkerja sama, dan memotivasi orang lain agar dapat melaksanakan program bersama dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan bersama.

Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan juga menumbuhkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya, tujuan tersebut sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu idelogi tertentu (Jamaludin, 2015: 85).

Pimpinan tertinggi dalam birokrasi tradisional Batak Toba di setiap wilayah disebut raja. Raja adalah seorang pemimpin, penganyom, dan pemersatu rakyat. Pemimpin memiliki kedudukan, kuasa dan wibawa yang khas yang berimplikasi terhadap hubungannya dengan rakyat dan dalam pengambilan keputusan. Kekhasan tersebut didasarkan atas nilai budaya kerohanian dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsep raja bagi masyarakat Batak Toba bukan sebagai kepala pemerintahan, namun lebih berkaitan dengan tanggung jawab, oleh karena itu raja adalah seorang yang disegani, dihormati dan dipatuhi.

Semua posisi fungsional dalam kehidupan masyarakat dan status sosial dalam struktur relasional budaya Batak Toba selalu disebut raja. Dalam struktur kultural relasional hal itu disebut *Dalihan Na Tolu,* yang terdiri dari unsur kekeluargaan Batak: *dongan tubu, hula-hula,* dan *boru.* Ketiga unsur relasi kultural ini disebut raja, sehingga ada raja *ni dongan tubu* (raja dari teman semarga), *raja ni hula-hula* (raja dari pihak marga perempuan), dan raja *ni boru* (raja dari keluarga yang beristerikan semarga pihak laki-laki). Ada juga raja *ni dongan sahuta* (raja teman sekampung), bahkan raja *na ginokkon* atau raja *na ro* (raja dari undangan atau raja yang diundang). Penyebutan raja juga dikenal kepada pelaksana tugas-tugas fungsional yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, ada *raja parhobas* (raja pelayan), ada *raja bondar* (raja tali air atau irigasi), bahkan ada nama seseorang raja *napogos* (raja yang miskin). Di kalangan masyarakat Batak juga dikenal sebutan *tangko raja* (mencuri ala raja, secara raja). Dari pemakaian kata raja di sini jelas menunjukkan sifat perilaku (*pangalaho/*karakter) yang dimiliki seseorang (Lumbantobing, 2018: 144).

Penyebutan raja terhadap pelaksana tugas-tugas fungsional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba merupakan hal yang lumrah, karena yang dituntut dan yang diharapkan dari seorang pelaksana tugas fungsional adalah; karakternya, perilakunya, dalam bersikap dan bertindak, berkomunikasi dan berpikir tentang tugas yang diembannya. Dalam pemahaman raja sesuai dengan budaya Batak, peranan dan fungsinya tidak ada hubungannya dengan kekuasaan politis, struktur dan hierarki kepemimpinan. Raja yang dikenal dan dipahami dalam budaya Batak bukanlah raja politis. Dengan demikian, seorang raja, apa pun status sosialnya dan tugas apa pun yang diemban dan dilakukannya, haruslah seorang yang memiliki *sahala*, *wibawa*, dan terhormat. *Raja na marsahala* (raja yang memiliki *sahala*), adalah raja yang berwibawa, bijak, memiliki otoritas spiritual, sehingga menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat (Lumbantobing, 2018: 145).

Kriteria seseorang yang memiliki *sahala,* bijaksana dalam bertindak, adil terhadap semua orang, pengayom dan penggembala masyarakat, solider, pemerhati, dan siap memberi pertolongan kepada orang lain, memberi tumpangan, menjamu makan setiap tamu yang datang dan menjadi pembimbing dalam kehidupan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki *sahala* adalah bila ia menjadi panutan, *tau sitiruon jala siihuthonon,* dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ia memiliki kriteria seperti itu, maka ia disebut, diakui, dan dipatuhi sebagai seorang raja. Jadi, kerajaannya tidak bersifat politis, tetapi berdasarkan pada karakter dan perilakunya dalam kehidupan masyarakat (Lumbantobing, 2018: 146).

1. **Sistem Kepemimpinan Dalam Wilayah Masyarakat Batak Toba Tradisional**

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang membentuk sistem sosial tertentu dan secara bersama memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, dan hidup dalam satu wilayah tertentu, serta memiliki pemerintahan untuk mengatur tujuan kelompoknya atau individu dalam organisasinya. Dalam masyarakat, secara perlahan terbentuk suatu struktur yang jelas, yaitu terbentuknya kebiasaan, cara, nilai, dan norma serta adat istiadat. Struktur sosial yang terbentuk ini kemudian lama-kelamaan menyebabkan adanya spesialisasi dalam masyarakat yang mengarah terciptanya status sosial yang berbeda antar individu.

Perbedaan status sosial pada masyarakat akan diikuti pula oleh perbedaan peran yang dimiliki sesuai dengan status sosial yang melekat pada diri seseorang. Perbedaan inilah yang

menimbulkan pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial pada kenyataannya merupakan seperangkat kerangka konseptual untuk memahami dan mendefinisikannya sebagai satu aspek dari organisasi sosial (Jamaludin, 2015: 66).

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan bahwa stratifikasi sosial sebagai kelas sosial, yaitu suatu strata (lapisan) orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum (rangkaian kesatuan) status sosial. Dengan demikian, pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarki). Perwujudannya adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan disebut strata sosial (Jamaludin, 2015: 67).

Talcoltt Parsons dalam teori sistem struktural fungsional menyatakan lembaga kemasyarakatan atau organisasi sosial atau institusi sosial adalah sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas individu atau masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola normatif dan nilai-nilai sosial budaya, sebagai alat kontrol sosial yang ada di dalam masyarakat (Johnson, 1986: 117). *Huta, horja* dan *bius* masing-masing mempunyai otonomi dan otoritas untuk mengatur daerahnya dalam batas-batas dan kegiatan-kegiatan yang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan bersama. Karena itu tiap teritorial *huta, horja* dan *bius* memiliki hukum dan aturan tersendiri.

Dalam masyarakat tradisional muncul nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai ideologi negara, termasuk birokrasi. Meminjam istilah Clifford Geertz, ini merupakan sistem konseptual setempat di bidang ideologi politik dalam persekutuan masyarakat, kesatuan politik, atau pemerintahan Batak Toba. Ada dua tipe struktur birokrasi tradisional Batak Toba dalam Dinasti Si Singamangaraja, yaitu: teritorial dan fungsional-institusional. Secara teritorial, birokrasi tradisional Batak Toba/Dinasti Singamangaraja terbagi atas empat: *huta, horja, bius*, dan dinasti (Sangti, 1977: 401-420).

Secara fungsional birokrasi memiliki institusi sesuai dengan bidang kegiatan utama birokrasi agraris tradisional. Fungsi yang dimaksud ialah sosial (adat), perekonomian (pertanian), pertahanan dan keamanan, keagamaan, dan bidang peradilan. Pimpinan puncak dalam struktur birokrasi pada tingkat pusat atau dinasti diduduki oleh Raja Singamangaraja, sedangkan masing-masing fungsi dipimpin oleh seorang kepala dan masing-masing memiliki otonomi dalam melaksanakan tugasnya.

Pitirim A. Sorkin mengemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis) (Bagong, 2004: 152). Perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti dari lapisan dalam masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, tanggung jawab nilai-nilai sosial serta pengaruhnya diantara anggota masyarakat.

Wilayah sebagai sebuah satuan sosial masyarakat dalam perdesaan dibatasi oleh kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan mengatur wilayahnya tersebut. Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dengan batas pemerintahan tertentu. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Maka desa dengan wilayahnya adalah sebuah kesatuan hukum yang mengikat masyarakat yang ada di dalamnya (Bintarto, 1989: 13).

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia. Sebelum masa kolonial Belanda, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus, baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman. Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan (Jamaluddin, 2015: 1).

Kepemimpian *huta* diwariskan dari nenek moyang kepada anak cucu, artinya kepemimpinan *huta* harus tetap di tangan marga raja (pendiri kampung). Raja *huta* mengurus segala keperluan di *huta* secara musyawarah dengan saudara-saudaranya serta *boru* termasuk mengatur pendirian rumah di dalam huta juga menghukum orang yang membuat keonaran. Raja *huta* berhak penuh dan mutlak mengatur *huta*nya dan biasanya pola pemerintahan *huta* bagi orang Batak ini sangat otonom (Tampubolon, 1968: 7).

Raja *Parjolo* sebagai pimpinan *horja*, menurut tugasnya berhak menyatakan perang dan mengatur pekerjaan-pekerjaan besar yang ada kaitannya dengan kepentingan anggota. Mengatur persiapan *horja rea* (pesta persembahan besar) dan membawakan doa-doa ritual (*martonggo*) walau pemimpin upacara *martonggo* tetap ada pada *parbaringin*. Tugas dan wewenang *parbaringin* dalam ritual keagamaan adalah mempersembahkan kurban kepada “*Debata Mula Jadi Na Bolon*, *sombaon* dan roh leluhur”. Selama menjalankan tugasnya *parbaringin* harus menyisipkan ranting beringin di serbannya, inilah sebagai simbol mengapa ia disebut parbaringin (*parsanggul beringin*) (Siahaan, 2005: 156-157).

Pusat kegiatan *bius* disebut dengan *parbiusan* (tempat persidangan raja-raja *bius*). Keputusan raja-raja *bius* adalah sah dan mutlak menjadi keputusan rumpun keluarga yang diwakilinya dan apa yang disetujui *mereka* adalah persetujuan dari rumpun keluarga. Untuk merencanakan dan menata pembangunan demi kesejahteraan rakyat *biu*s, raja-raja *bius* memilih raja *na opat bius* sesuai dengan keahliannya yang berfungsi merencanakan dan menata mengenai bidang kepercayaan rakyat *bius*. Raja *na opat bius*, yakni: *Pertama*, raja adat berfungsi merencanakan dan menata mengenai hukum dan adat. *Kedua*, raja *parbaringin* berfungsi merencanakan dan menata mengenai bidang sosial politik dan keamanan *bius*. *Ketiga*, raja *bondar* berfungsi merencanakan dan menata mengenai perekonomian *bius*. *Keempat*, pimpinan *bius* yang disebut *ulu bius* dipilih raja-raja *bius*. *Ulu bius* ini pada mulanya disebut *ihutan*, yang dituakan dan kemudian berkembang menjadi raja adat, pimpinan keagamaan dan pimpinan pemerintahan.

Raja-raja *bius* berasal dari raja *jolo* marga dan dapat diwakili anak *sibulang-bulangan* (pilihan) marga. Raja *bius* adalah wakil dari *horja*. Raja-raja *bius* sering disebut *partuho mangajana* yaitu pemilik hikmat kebijaksanaan masyarakat umum sesuai dengan masing-masing marga. Masing-masing raja *bius* memilih *uluan* melalui masyarakat *horja*. *Uluan* adalah pemimpin pelaksana dari satu *horja* dari kesatuan marga pada *lumban* (beberapa *huta*). Raja-raja *bius* berfungsi sebagai wakil rakyat dan penyelenggara pemerintahan yang dipercayakan kepada *raja na opat bius*. *Uluan* sebagai pelaksana pada *horja* menugasi para *parhobas* (pelayan) sesuai dengan kemampuannya. Raja-raja *na opat bius* membuat rencana rutin tahunan program kegiatan untuk dilaksanakan *uluan horja* tiap tahunnya.

Seorang dapat menjadi raja *ihutan* tidak berdasarkan keturunan, atau bukan warisan orang tua kepada anaknya. Raja *ihutan* diangkat berdasarkan hasil pemilihan raja-raja adat. Adakalanya otoritas, wibawa raja *ihutan* dapat tersalur kepada keturunannya, sehingga pengganti raja *ihutan* diangkat dari anaknya. Namun, dapat pula diganti, bahkan bila perlu menggantikannya sebelum masa waktu pergantian. Hal itu dapat terjadi apabila keturunan raja *ihutan* tersebut dianggap tidak layak memangku jabatan sebagai *jaihutan,* misalnya karena dipandang tidak bijak dan kurang memiliki wawasan sebagaimana yang diharapkan, yang harus dimiliki oleh seorang raja *ihutan* (Lumbantobing, 2018: 146)*.*

Kedudukan *ihutan* adalah untuk mengayomi program. Raja-raja *bius* di dalam kesepakatan pada sidang umum(*mangajana*) menetapkan semua hal yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat *bius*, seperti pertanian, perburuan, perikanan, semua bentuk gotong royong. Semua perintah dari *harajaon* Batak disampaikan kepada *ihutan* melalui raja *maropat* dan diteruskan ke *bius*. Semua perintah itu dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat, apabila perintah (*tona*) tidak dilaksanakan akan mendatangkan bala. Menyangkut hukum perdata maupun pidana (termasuk adat) ada di tangan raja-raja *bius* setelah mendengar *panimbangi* (penasehat) dan *ihutan*. Kuasa menyetujui dan untuk melaksanakan suatu ketetapan berada di tangan raja-raja *bius*.

*Ihutan* mempunyai peranan karena dipandang pemilik hikmat kebijaksanaan dalam kedudukannya. Bagi pengembanan aspek hukum, ikatan yang paling mendasar dari raja *ihutan* adalah segi kerohanian yang dianggap ritual. Sulit bagi masyarakat mengingkari perintah dari *ihutan* termasuk perintah dari raja-raja *bius*, setiap perjanjian baik berbentuk tulisan maupun lisan, ini sangat kuat dan sulit dibedakan nilainya. Kuasa *bius*, didelegasikan kepada raja *na opat bius* yang meneruskan ke *uluan horja* dan seterusnya kepada raja *jolo lumban* sampai *tunggane huta* dari *huta*. Dalam hal rapat ketua sidang *bius* adalah seorang dari raja *doli*, tetapi harus dari marga *sihahaan* (marga yang tertua) dan yang terpilih menjadi ketua dan dinamakan sebagai raja *bolon* (raja besar, raja mulia). Salah satu bukti bahwa *bius* tergolong organisasi wilayah yang menyangkut soal-soal pemerintahan yaitu bahwa setiap keputusan *bius* tidak bisa dibantah maupun dibandingkan sebab tidak ada lagi organisasi yang lebih tinggi dari *bius*. Kalau seseorang tidak menerima keputusan rapat *bius*, maka satu-satunya jalan adalah melakukan perang yang dinamakan *manguji* (mencoba) antara orang yang diadili di pengadilan *bius* (Siahaan 2005: 159).

1. **Pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Toba**

Pada saat kolonial Belanda menjajah Indonesia, terjadi perubahan politik dan pemerintahan yang sangat mendasar, mencakup kekuasaan melakukan intervensi dalam tata organisasi desa untuk mempertahankan hegemoninya. Sifat dan bentuk desa mulai mengalami proses transisi dan berubah menjadi wilayah teritorial atau memiliki wilayah hukum. Desa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dengan diterbitkannya berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan kolonial. Meskipun demikian, dalam proses penentuan dan pemilihan pemimpin desa masih belum dicampuri, pemerintahan Belanda, mulai memosisikan pimpinan desa sebagai wakil, kepentingan penguasa secara tersamar (Jamaluddin, 2015: 2).

Pada tahun 1818, pemerintah kolonial Belanda telah merinci persyaratan untuk menjadi kepala desa, dengan memasukkan unsur-unsur seperti pendidikan, kesehatan jasmani, mental, fisik, dan usia di luar perilaku etika dan moralitas berupa budi pekerti, keteladanan, ketaatan beragama, dan norma susila lainnya. Sejak saat itu, dimulai babak baru intervensi kekuasaan kolonial terhadap beragam organisasi dan kelembagaan desa untuk kepentingan pihak luar. Pemerintah kolonial memberikan peran ganda kepada kepala desa, yaitu pada satu sisi bertindak mewakili kepentingan rakyatnya, pada sisi lain mewakili kepentingan pimpinan atau atasan yang banyak ditunggangi kepentingan pribadi atau kekuasaan (Sumpeno, 2011: 2). Hal ini menyebabkan pembukaan *huta* (kampung)baru semakin besar, disebabkan tingginya keinginan untuk memperoleh jabatan *hampung* (kepala kampung)*.*

Kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar yang kompleks. Adapun keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa (pemimpin) dan yang terpaksa. Ada pemimpin disatu bidang tertentu, adapula pemimpin dalam banyak segi kehidupan. Ada pemimpin yang mencari pengikutnya dan ada yang justru dicari pengikutnya. Ada pemimpin resmi (*formal leader*) dan ada yang *informal leader* (Soekanto, 2002: 288-289).

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (Weber, 2006: 180).

Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, namun sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Kekuasaan ada dalam setiap bentuk masyarakat, baik yang bersahaja maupun masyarakat yang kompleks (Soekanto, 2006: 230). Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, atau antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa, sehingga apabila kekuasaan itu diaktualisasikan pada diri seseorang, orang tersebut dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruh-pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

Kepemimpian di Tapanuli Bahagian Utara tidak lepas dari sejarah Tanah Batak/ Afdeeling Batak Landen yang saat ini disejajarkan dengan wilayah administatif pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara sekarang. Walaupun wilayah yang termasuk wilayah Batak Landen yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya sama dengan kawasan Tapanuli sekarang, namun kawasannya hampir sama. Perbedaan yang jelas adalah kawasan Dairi, karena pada masa pemerintahan kolonial sampai periode setelah kemerdekaan (1963) termasuk dalam kawasan Afdeeling Batak Landen atau Tapanuli Utara.

Wilayah Afdeeling Batak Landen adalah salah satu wilayah yang terakhir menjadi salah satu Afdeeling Keresidenan Tapanuli. Keterlambatan itu tidak dapat dipisahkan dari perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Sisingamangaraja XII (1877-1907). Wilayah terakhir dikuasai oleh pasukan kolonial adalah Samosir dan tanah Pak-Pak (Dairi) yang merupakan basis terakhir Sisingamangaraja XII.

Tahun 1859, pasukan Belanda memasuki kawasan Silindung. Pada masa sebelumnya di kawasan ini telah ada upaya Zending Kristen untuk menyebarkan agamanya pada penduduk setempat. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pengembangan agama Kristen di pedalaman Tapanuli ini akan memudahkan Belanda memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1872, Residen Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga berkunjung ke Silindung. Mereka terus berusaha untuk meluaskan kekuasaannya ke dataran tinggi Toba (Harahap, 1994: 148).

Pemimpin *jaihutan* atau raja *ihutan* adalah model kepemimpinan asli daerah Batak, yang tidak merupakan dinasti. Akan tetapi, di kemudian hari seorang *jaihutan* ditetapkan sebagai hasil penunjukan atau pemilihan oleh masyarakat melalui pemimpin-pemimpin adat Batak yang terdapat pada satu *hundulan* (wilayah atau region) tertentu. Awalnya pemerintah kolonial Belanda mengakui, lalu kemudian menerima status jabatan *jaihutan* tersebut. Lama-kelamaan, pihak pemerintah kolonial Belanda yang mengadakan langsung pemilihan secara terbuka jabatan *jaihutan*. Tentu saja hal itu dimaksudkan dalam rangka mengamankan calon *jaihutan* agar sesuai dengan yang dikehendakinya (Castle, 2001: 26). Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Kolonial Belanda merasa berhak mengangkat atau bahkan menggantikan *raja ihutan* di beberapa wilayah tertentu. Tidak heran bila ada *raja ihutan* yang tidak didukung dan tidak disukai rakyatnya sendiri.

Setelah Belanda berkuasa di Tapanuli, struktur *huta*, *horja* dan *bius* tradisional telah dirombak. Adakalanya *huta* tetap disebut *huta* tetapi maknanya telah berubah. Beberapa *huta* kecil digabung dengan pemimpin seorang kepala, yang sering menimbulkan masalah diantara sesama warga. Raja *huta* tradisional diganti menjadi raja *ihutan* atau *jaihutan* atau kepala negeri yang diangkat oleh pemerintah Belanda dan tunduk pada administrasi kolonial. Ketika Belanda ingin mengganti pemerintahan *bius* yang pemerintahan aslinya berbentuk dewan *bius* menjadi negeri (*nagari*) sebagai unit pemerintahan terbawah maka Belanda menggunakan *bius* lama sebagai titik tolak. Setiap *bius* lama dengan beberapa pengecualian, menjelma menjadi negeri yang dikepalai oleh seorang kepala negeri (*nagari*) yang pada mulanya diberi gelar *jaihutan* (dipatuhi/diikuti). Mereka diangkat oleh Belanda untuk menggantikan raja *bius* (dewan *bius*) dan dari kebijakan itu lahirlah *negeri*.

Ketika bangsa Indonesia merdeka, intervensi kebijakan terhadap organisasi dan kelembagaan masyarakat desa cenderung meningkat, bahkan terjadi penyeragaman terhadap berbagai aturan pemerintahan. Desa menjadi lahan subur bagi upaya memperkuat kekuasaan politik tertentu. Hal ini tidak lebih baik, jika dibandingkan dengan yang diterapkan pemerintahan kolonial Belanda yang masih menyadari adanya perbedaan dalam organisasi masyarakat desa. Pada masa kolonial Belanda terdapat berbagai undang-undang dan aturan yang berbeda antara pulau Jawa dengan pulau lainnya (*IGO, Inlandsche Gemeente Ordonantie* untuk Jawa dan *IGOB, Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten,* untuk luar Jawa)*.* Meskipun keduanya tetap merongrong eksistensi otonomi desa yang sudah tumbuh cukup lama di Indonesia (Jamaludin, 2015: 2)*.*

Setelah zaman penjajahan berakhir dan Indonesia memasuki masa kemerdekaan maka istilah penyebutan daerah yang dibuat oleh kolonial Belanda juga mengalami perubahan penyebutan. Nama Afdeeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah Batak. Nama Onder Afdeeling diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onder Afdeeling sebagai Kepala Urung. Onder Distriken diganti menjadi Urung Kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang. Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi Kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang.

1. **Relevansi Sistem Kepemimpinan Tradisional Terhadap Pemilihan Pemimpin Masyarakat Kini**

Kemajuan suatu wilayah sangat bergantung pada figur kepemimpinan di wilayah tersebut. Kepemimpinan menganalisa perihal pemimpin, konsep kepemimpinan, dan mekanisme pemilihan pemimpin. Dalam tulisan ini telah diuraikan pemimpin, konsep pemimpin dan mekanisme pemilihan pemimpin dalam masyarakat Batak Toba Tradisional dan masa kolonial Belanda. Kini kita akan melihat pemilihan pemimpin pada masyarakat Batak Toba dalam masa kini.

Pemilihan pemimpin merupakan sebuah aktivitas politik dari masyakarat. Menurut Max Weber ada empat alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas politik, yakni: 1). Rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok; 2). Emosional efektif, yaitu alasan yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide organisasi, partai atau individu; 3). Tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku Individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial; 4). Rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi (Damsar, 2010: 193-197).

Masyarakat Batak Toba mengenal gelar *sisuan bulu*. *Sisuan bulu* diberikan kepada orang yang membuka perkampungan, yang selanjutnya dinamai raja *huta*. Raja *huta* adalah orang yang memprakarsai pembukaan kampung yang baru dan disebut sebagai *sipungka huta* (pembuka kampung) atau *sisuan bulu*. Setiap pembukaan perkampungan baru dibuat *parik* (tanggul) yang mengelilingi kampung, *parik* tersebut ditanami dengan bambu(*disuan bulu*). Tujuan pembuatan *parik* sebagai benteng untuk menyulitkan binatang buas yang akan mengganggu/mengusik ketentraman warga kampung, serta sebagai pagar atau benteng kampung dari serangan musuh. Penanaman bambu juga untuk melindungi warga kampung dari dinginnya terpaan angin, yang bisa menusuk hingga ke sendi-sendi tulang.

Raja *huta* bukan merupakan penguasa tunggal dan tertinggi tetapi dalam penyelenggaraan kepemimpinan teritorial dan pemerintahan, dia bersama dengan sejumlah *pangitua ni huta* (tokoh masyarakat), sehingga kepemimpinan *huta* bersifat kolektif bukan partial. Selanjutnya pemimpin kolektif (*sisuan bulu* dan tokoh masyarakat) inilah yang membuat aturan/tatanan hukum dikampung tersebut dan tempat bertanya masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran maupun perselisihan, kepada mereka dimintakan pertimbangan atas sanksi atau hukuman yang akan diberikan.

Dahulu sangat lumrah terjadi perang antar kampung maupun antar marga. Apabila terjadi perang antar kampung maka akan melibatkan marga yang umumnya belum memiliki ikatan kekerabatan (*partuturon*). Untuk menghindari perang antar kampung yang akan merugikan semua pihak, maka beberapa marga sepakat untuk menjalin hubungan kekerabatan baik itu melalui pernikahan putra putri mereka maupun melalui ikatan janji (*marpadan*). Sangat logis dan masuk akal apabila telah terjalin hubungan kekerabatan, maka kemungkinan perang antar marga/kampung tersebut akan sangat kecil.

Masyarakat Batak Toba hidup dalam sistem kekerabatan yang disebut *dalihan na tolu,* yang menjadi falsafah dalam kehidupannya.Falsafah orang Batak adalah suatu kebenaran hakiki yang menggambarkan tentang ciri khas Batak, yang mengatur perilaku hubungan kekerabatan dan interaksi antara yang satu dengan yang lain, yang saling mempengaruhi, saling menentukan, saling berhubungan, saling membutuhkan yang diikat dalam konsep berbasis adat yang disebut sistem *dalihan na tolu* (*somba marhula-hula, manat mardongan tubu,* *elek marboru*) (Tampubolon, 2002: 144).

*Dalihan Na Tolu* mengajarkan orang Batak bagaimana harus menempatkan diri dan berperan dalam bermasyarakat, kegiatan adat, dan kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan memunculkan berbagai kesatuan atau asosiasi yang dalam bahasa batak disebut *Punguan* (kumpulan) marga, yang terdapat di kampung halaman maupun di perantauan. Pembentukan *punguan* marga mencirikan budaya Batak dan berdiri atas dasar kesamaan marga. *Punguan* marga membawa masyarakat Batak Toba pada wujud kepedulian terhadap nilai-nilai budaya yang selama ini dipertahankan.

Memilih sebenarnya bukanlah sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Melihat perilaku memilih seseorang cendrung akan mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana dia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di dalam masyarakat, sarjanawan politik biasanya menunjung tiga faktor utama sebagai indeks paling awal pendekatan sosiologis ini, yaitu sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal (Roth, 2009: 24-25).

Karakteristik sosial dan pengelompokkan-pengelompokkan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian faktor agama, aspek geografis (kedaerahan) dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih (Nursal, 2004: 55-56).

Hak konstitusional masyarakat dalam memilih pasca reformasi mendapatkan tempat yang sangat terhormat, namun pada era reformasi terjadi perubahan perilaku pemilih yaitu munculnya pemilih sosiologis yang semakin kuat. Dalam perhelatan pemilukada dan pemilu, masyarakat lebih cenderung memilih berdasarkan preferensi tertentu yang berbasis primordial, bahkan tidak sedikit di ranah lokal/daerah politik identitas tidak terelakkan dalam kontestasi politik. Masyarakat cenderung memilih dengan melihat latar belakang calon kandidiat yang didasarkan pada ikatan suku/etnis, ras, agama, golongan, lebih utama dibandingkan dengan melihat rekam jejak, visi misi dan program calon.

Pemilihan pemimpin pada masyarakat Batak Toba hingga kini masih memperhitungkan latar belakang calon seorang pemimpin. Latar belakang bukan hanya dari pendidikan atau modal lain dari calon pemimpin yang mumpuni, namun lebih kepada aspek-aspek sosiologis. Faktor *sisuan bulu* ataupun keturunan dari *sisuan bulu* masih menjadi faktor penentu seseorang untuk dipilih menjadi pemimpin dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan. Apabila yang terpilih menjadi seorang pemimpin bukan berlatar belakang dari keturunan *sisuan bulu* atau raja *huta*, seringkali mengalami kendala bahkan tidak didukung oleh keturunan atau kerabat dari *sisuan bulu/raja huta* dalam menjalankan berbagai program yang telah dirancang, sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan bersama.

Dalam konteks organisasi sosial keagamaan, mulai dari masa pekabaran Injil di Tapanuli hingga perkembanganya kini figur *sisuan bulu* sangat diperhitungkan. Dapat dilihat pada kebijakan misionaris I. L. Nommensen yang melakukan pendekatan terhadap tokoh dan raja setempat sebelum memulai misinya. Nommensen terlebih dahulu menjumpai, berkenalan, dan akhirnya menjalin persahabatan dengan orang-orang yang dipandang berpengaruh di daerah yang ditujunya. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan setiap misionaris yang datang ke suatu daerah, mereka terlebih dahulu mencari tokoh masyarakat setempat, agar dapat menjadi pemandu dan pendukung tugas pekabaran Injil.

Kebijakan Nommensen tersebut berdampak pada beberapa dari *raja ihutan* yang aktif mendukung pemberitaan Injil dengan turut serta menghimbau rakyatnya, sehingga kekristenan maju pesat. Dari kondisi seperti itu dapat diketahui bahwa masuknya orang Batak menjadi Kristen lebih disebabkan keputusan rajanya dari pada keputusan pribadi. Kasus Raja Pontas Lumbantobing dan Raja Amandari juga demikian. Kedua raja tersebut mendorong rakyatnya untuk menerima Injil Kristus, sekalipun mereka baru belakangan masuk dan menerima kekristenan. Hal itu sejajar dengan metode penginjilan yang dilakukan Nommensen, yaitu dengan metode menjala dan bukan dengan metode memancing. (Lumbantobing, 2018: 96).

Pada perkembangan selanjutnya para tokoh dan raja setempat diangkat menjadi penatua gereja. Pengangkatan penatua berkaitan dengan tata desa. Dalam desa Batak tradisional dikenal jabatan *pangituai ni huta* yang kemudian mempengaruhi pengertian jabatan *sintua* dalam gereja. Orang-orang yang disebut *pangituai* adalah bapak-bapak yang sudah lanjut usia, yang merupakan rapat para tua-tua, yang diketuai oleh raja dan harus merundingkan dan memutuskan urusan-urusan penting dari desa itu, seperti pesta, perselisihan, perkara dan pembangunan desa baru. Seorang yang memangku jabatan *pangituai ni huta* adalah orang yang dianggap mempunyai *sahala* (wibawa, kuasa, kemahiran, kemewahan) dan itu ditentukan bila dia sanggup membangun kampung baru, menang berjudi, menang berperang atau berperkara, mahir bersoal jawab.

Dalam dasawarsa pertama zending tidak terbayangkan beratnya menjadi *sintua,* yakni penatua jemaat, karena hal itu berarti menjadi pembantu zendeling. Tetapi dengan semakin mantapnya kekuasaan kolonial maka jabatan itu menjadi suatu jabatan yang disukai (Lumbantobing, 1961: 105). Dalam daerah-daerah yang sudah dikristenkan masih berlangsung terus lembaga *pangintuai* desa; para penatua jemaat tidak sama dengan mereka, walaupun mereka ini juga pada umumnya diakui sebagai orang-orang yang terhormat. Pada mulanya para penatua jemaat itu diangkat untuk dua tahun. Mulai dengan abad ini jabatan penatua itu berkembang menjadi suatu kedudukan seumur hidup, kendatipun itu hanya suatu kedudukan kehormatan. Dari sudut etnologi agama, maka jabatan *pangituai* yang lama diganti dan dirombak menjadi jabatan penatua jemaat gereja suku. Dengan demikian Rheinische Mission telah menyedikan dan memberikan kepada kaum awam suatu peranan yang asasi dalam pengkristenan suku bangsa itu secara intensif maupun secara ekstensif. Dalam kesadaran rakyat, penatua jemaat itu telah menjadi soko guru gereja setempat (Lumbantobing, 1961: 52-57).

Apabila dikaitkan dengan proses pemilihan kepala daerah dan pejabat pemerintahan desa, faktor *sisuan bulu, raja huta* atau *marga raja,* dan sistem kekerabatan *dalihan na tolu* dapat menjadi alat politik bagi para kandidat yang biasanya dilakukan di perkumpulan atau *punguan* marga. Masyarakat Batak Toba cenderung memiliki kekhasan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya, seperti lebih mengutamakan kesamaan marga daripada memahami paparan visi, misi maupun program yang ditawarkan.

Pada pemilihan kepala desa (*hampung*) pengaruh *raja huta* sangat diperhitungkan. Apabila ada keturunan *raja huta* dan *halak na ro* (orang pendatang/perantau) yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, maka *halak na ro* tidak bisa mencalonkan diri, dan apabila *halak na ro* tersebut dapat maju dalam pemilihan, pemenang pemilihan tersebut adalah keturunan *raja huta*. Walaupun demikian pada beberapa daerah ada kepala desa yang bukan berasal dari keturunan *raja huta*, yang memiliki prestasi menggembirakan. Namun tidak dapat dipungkiri pengaruh *sisuan bulu/raja huta* sangat berpengaruh terhadap maju tidaknya suatu daerah, sehingga apabila *halak na ro* menjadi pemimpin di suatu daerah, dia akan menggunakan pendekatan kekerabatan agar keturunan *raja huta* mendukungnya, seperti melalui proses pernikahan dengan marga *raja huta*.

**KESIMPULAN**

Kepemimpinan menjadi kunci dalam membangkitkan, memajukan bahkan dapat menghancurkan sebuah kelompok, organisasi, termasuk masyarakat dalam suatu wilayah/daerah. Kepemimpinan yang kuat akan menjadikan sebuah daerah bertumbuh dan berkembang serta berakar dengan kuat. Kepemimpinan yang baik menggerakan masyakat untuk dapat hidup meneladani pemimpinnya dan bertumbuh serta berkembang maju. Melalui kepemimpinan yang baik, masyarakat dapat didorong, digerakkan dan diarahkan untuk mewujudkan daerah yang aman dan sejahtera.

Wilayah pada masyarakat batak tradisional terdiri atas beberapa tingkatan yaitu: *Huta*, *Lumban*/*Horja* dan *Bius*, tiap tingkatan dipimpin oleh seseorang Raja yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Raja *huta* berhak penuh dan mutlak mengatur *huta*nya dan biasanya pola pemerintahan *huta* bagi sangat otonom. Raja *Parjolo* sebagai pimpinan *horja*, menurut tugasnya berhak menyatakan perang dan mengatur pekerjaan-pekerjaan besar yang ada kaitannya dengan kepentingan anggota. Pimpinan *bius* yang disebut *ulu bius* dipilih raja-raja *bius*. *Ulu bius* pada mulanya disebut *ihutan*, yang dituakan dan kemudian berkembang menjadi raja adat, pimpinan keagamaan dan pimpinan pemerintahan.

Pada akhirnya jelas disimpulkan bahwa sistem kepemimpinan tradisional dalam Batak Toba masih relevan hingga saat ini dari aspek teori dan prakteknya. Sistem kepemimpinan tradisional dapat dilihat dari aspek sosiologis dan historis, serta dikotomi yang pernah dirasakan oleh masyarakat Batak Toba karena pengaruh intervensi kolonial Belanda. Hal itu dikuatkan dengan realita pemilihan pemimpin di tengah masyarakat Batak Toba masa kini, dimana terjadi perubahan perilaku pemilih yaitu munculnya pemilih sosiologis yang semakin kuat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Castle, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – KPG.

Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Kencana.

Harahap, Mohd. Yusuf, Dkk. 1994. *Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah*. Medan.

Jamaludin, Adon Nasrulah. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. PustakaPedia.

Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.

Lumbantobing, Darwin. 2018. *Tumbuh Lokal Berbuah Universal*, Jakarta: BPK Gunung

Mulia.

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah*

*Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : Gramedia

Pustaka Utama

Schreiner, Lothar. 2011. *Adat dan Injil Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah*

*Batak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Siahaan, Bisuk. 2005. *Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu*, Jakarta: Kempala

Foundation

Sangti, Batara. 1977. *Sejarah Batak Toba*. Balige : Karl Sianipar.

Simanjutak, Bungaran A. 2006. *Struktur sosial dan Sistem Politik Batak Toba*, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*

*Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia.

Sinaga, B. Anicetus. 2007. *Imamat Batak Menyongsong Katolik*, Medan: Bina Media

Perintis.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi:Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Tampubolon, Raja Patik. 2002. *Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak- Patik Uhum*

*Cetakan ke-2* Jakarta: Dian Utama.

Bagong, Suyanto dan J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*.

Jakarta: Kencana.

Tampubolon, I. 1968. *Adat mendirikan Huta/Kampung*, Medan: Percetakan Philemon Siregar

Vergouwen, J.C. 1985. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pusata Azet

Roth, Dieter. 2009. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*.

Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung-fur die Freiheit.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Jakarta: Read.

Weber Max, 2006. *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, yang diterjemahkan

oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.